

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Antonius Sudirman. (2007) *Hati Nurani Hakim dan Putusannya: Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bismar Siregar*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Asyhadie, Z. (2005) *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Asyhadie, Z. dan Sutrisno, B. (2012) *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*. Erlangga, Mataram.
- Atmadja, A.S. (2005) *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum: Teori, Praktek, dan Kritik*. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Cahyono, M.N. (2020) *Hukum Badan Usaha Milik Negara: Konsep, Regulasi, dan Implementasi*. Deepublish, Yogyakarta.
- Fuady, M. (2003) *Perseroan Terbatas: Paradigma Baru*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ginting, E.R. (2018) *Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamdi Shubhan, M. (2008) *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Kencana, Jakarta.
- Ilmar, A. (2012) *Hak Menguasai Negara dalam Privatisasi BUMN*. LKiS Pelangi Aksara, Yogyakarta.
- Indrawati, Y. (2014) *Aktualisasi Hukum Keuangan Publik*. Mujahid Press, Bandung.
- Khairandy, R. (2009) *Korupsi di BUMN: Kajian atas Makna Kekayaan Negara yang Dipisahkan dan Keuangan Negara*. Ius Quia Iustum, Yogyakarta.
- Khairandy, R. (2013) *Pokok-Pokok Hukum Dagang*. FH UII Press, Yogyakarta.
- Koesnoe, M. (1995) *Perumusan dan Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Ditinjau dari Hukum Adat*. Varia Peradilan, Jakarta.
- Nurdin, A. (2012) *Kepailitan BUMN Persero Berdasarkan Asas Kepastian Hukum*. Alumni, Bandung.
- Pranowo, A. (2016) *BUMN dalam Perspektif Hukum dan Bisnis*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Pratama, D.R. (2024) *Hukum Korporasi dan Kekayaan Negara dalam BUMN Persero*. Prenadamedia Group, Jakarta.

- Purwosutjipto, H.M.N. (1984) *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 2. Djambatan, Jakarta.
- Rahayu, H. (2017) *BUMN Persero: Konsep Keuangan Negara dan Hukum Kepailitan di Indonesia*. Setara Press, Malang.
- Riawan, T.W. (2014) *Hukum Keuangan Negara*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Siregar, H. (2018) *Hukum Keuangan Negara*. Kencana, Jakarta.
- Situmorang, V. dan Soekarso, H. (1994), *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Sjahdeini, S.R. (2010), *Hukum Kepailitan: Memahami UU No. 37 Tahun 2004*. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Soekanto, S. (2005), *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soejono, H.A. (2003), *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Supramono, G. (2016), *BUMN Ditinjau dari Segi Hukum Perdata*. PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Sulaiman, A. (2011), *Keuangan Negara pada Badan Usaha Milik Negara dalam Perspektif Ilmu Hukum*. PT Alumni, Bandung.
- Sunarmi. (2009), *Hukum Kepailitan*. USU Press, Medan.
- Susilowati, E. (2013), *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Sugiyono. (2009), *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- Sukmadinata, N.S. (2005), *Metode Penelitian Pendidikan*. Rosda Karya, Bandung.
- Syarifuddin Rasyid. (2018), *Hukum Keuangan Negara*. Prenada Media, Jakarta.
- Vilianita, W. (2016), *Penerapan Good Corporate Governance dan Tanggung Jawab Holding Company terhadap Subsidiary pada Holding BUMN (Studi Kasus PT Pupuk Indonesia Persero terhadap PT Pupuk Sriwidjaja Palembang)*. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Indralaya.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara

Undang -Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

C. Jurnal

- Adhari, A. (2009). 'Kedudukan Keuangan BUMN terhadap Keuangan Negara', Jurnal Iusticia Dialogia, 6(1).
- Ariefulloh. (2018). 'Kedudukan BUMN sebagai Badan Hukum Publik dan Implikasinya terhadap Kekayaan Negara', Jurnal Legislasi Indonesia, 15(1).
- Damas Ali Wijaya dan Retno Sunu Astuti. (2022). 'Peran BPK dalam Menilai Kerugian Keuangan Negara pada BUMN', Jurnal Cattleyadf.
- Elda, A. (2021). 'Aspek Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara', Jurnal Synta Transformation, 2(2).
- Hamzah, A. (2021). 'Penegakan prinsip pemisahan kekayaan negara dan kekayaan BUMN', Jurnal Hukum & Pembangunan.
- Huda, N. dan Widyastuti, R.T. (2021). 'Tinjauan yuridis eksekusi terhadap aset BUMN dalam perspektif hukum perdata dan keuangan negara', Jurnal Hukum & Pembangunan, 51(3).
- Ikhwansyah, I. dan Lestari, R. (2018). 'Konsistensi Pengukuhan Kedudukan Kekayaan Negara yang Dipisahkan pada BUMN', Program Magister Kenotariatan Universitas Padjadjaran.
- Nurul Huda dan Rr. Tri Widyastuti. (2022). 'Permohonan Pailit terhadap BUMN dalam Perspektif Hukum Publik dan Kepailitan', Jurnal Hukum & Pembangunan, 52(1).
- Pontoh, A.R. (2013). 'Tugas dan Wewenang BPK dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan BUMN/D', Lex Administratum, 1(1).
- Radisma Saragih. (n.d.). 'Analisis Hukum Terhadap Keuangan BUMN sebagai Keuangan Negara', Jurnal Hukum.
- Rahayu, L.W., Aprita, S. dan Al Fajri, M.A.A. (2023). 'Analisis Kepailitan PT Istaka Karya sebagai BUMN', SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i, 10(4), pp. 1209–1220.
- Sulaeman, A. (2019). 'BUMN dan Fungsi Pelayanan Publik: Studi Terhadap Layanan Dasar di Wilayah 3T', Jurnal Administrasi Publik, 16(2).
- Tatohi. (2023). 'Kedudukan Kekayaan Negara yang Dipisahkan dalam Penyertaan Modal BUMN Persero', Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum, 3(2).
- Waskito, P.A. (2016). 'Analisis Yuridis Kepailitan pada BUMN', NOVUM: Jurnal Hukum, 3(1), pp. 28–37.

Widjaja, M. Syarafie. (2018). 'Sita Aset Anak Perusahaan BUMN dalam Holding BUMN', Jurnal Hukum, hal. 31.

Yuliasuti, R. (2015). 'Peran BUMN dalam Pelayanan Publik dan Pengembangan Ekonomi Nasional', Jurnal Administrasi Publik.

D. Putusan

Putusan Nomor 124 K/Pdt.Sus/2011

Fatwa Mahkamah Agung No. WKMA/ Yud/20/VIII/2006

E. Interenet

Nasional Hukum, Ini Kata Pakar Soal Kepailitan BUMN, diakses melalui <https://nasional/Kontan.co.id/news/ini-kata-pakar-soal-kepailitan-bumn>, pada tanggal 11 Februari 2019.

Amanda, T. (2024) *Akibat Hukum jika BUMN Pailit*. Tersedia di: <https://hukumonline.com/klinik/a/bumn-pailit--ini-akibat-hukumnya> [Diakses 3 November 2024, pukul 10.30 WIB].

